LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(LKjIP– SKPD)
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KLIRONG
Jl. Klegenwonosari No.-, Telp.-, Kode Pos : 54381

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara serta sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta yang terakhir Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Impelementasi Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Moderen yang handal, demokratis, professional, efisien, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta penjabarannya dari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen lebih akuntabel karena sudah terencana dan terkelola serta terpadu sesuai yang diharapakan sehingga terwujud pemerintahan yang baik.

Kebumen, 30 Januari 2024

CAMATKLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN

EKO PURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197901161998101001

DAFTAR ISI

COVER
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum Organisasi 1
1.2. Fungsi Strategis 9
1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan Strategis 14
1. Rencana Strategis (Renstra) 14
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 24
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 24
2.2. Perjanjian Kinerja 25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 26
3.2. Realisasi Anggaran 28
BAB IV PENUTUP
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja 33
4.2. Permasalahan/ Kendala 33
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang 33
LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja
2. Anggaran dan Realisasi Belanja

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Rincian Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, Susunan Organisasi Kecamatan Ayah terdiri dari:

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Selain itu Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi

1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
6) Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan ; dan
7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Dalam penyelenggaraan tugas, camat mempunyai fungsi :

1) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2) Pengkoordinasian upaya penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum
3) Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan;
6) Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
7) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
8) Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
9) Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
10) Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
11) Pembinaan Penyelengaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
12) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada di wilayahnya;
13) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
14) Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan dan
15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana ;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
4. Pelaksanaan urusan surat-menyurat kearsipan, perpusta-kaan, rumah tangga dan perlengkapan ;
5. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi;
6. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan;
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kecamatan ;
9. Koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan parasarana dan fasilitas pelayanan umum;
10. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan ;
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati ;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c.Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan Desa/kel. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan ;
2) Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan Desa/kel ;
3) Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4) Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
5) Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya ;
6) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;

7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kel di tingkat kecamatan;
8) Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kel;
9) Pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
10) Administrasi desa dan/atau kelurahan ;
11) Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahan beserta Perangkat Desa dan/atau Kelurahan ;
12) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan ;
13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

d.Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah :

1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang keamanan dan ketertiban ;
2) Penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ;
3) Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik ;
4) Penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu ;
5) Pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggung jawabnya ;
6) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di tingkat Desa;
7) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
8) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya
9) Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat ;
10) Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat ;
11) Pelaporan pelaksanaan pembinaan dan ketertiban ;
12) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
13) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya ;
14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e.Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evalusai dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk menjalankan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat menjalankan fungsi :

1) Penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
2) Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat ;
4) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkungan kecamatan ;
5) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
6) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;
7) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;
8) Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kel, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil ;
9) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya.

f.Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial. Tugas tersebut dijabarkan dengan beberapa fungsi, antara lain :

1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial ;
2) Pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ;
3) Percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
4) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kesehatan ;
5) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Kecamata;
6) Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan

7) Koordinasi dengan perangkat daerah dan /atau instansi vertikal yang tugas dan fungsunya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8) Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
9) Penanganan bencana alam dan bencana sosial ;
10) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya ;
11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

g.Struktur Organisasi

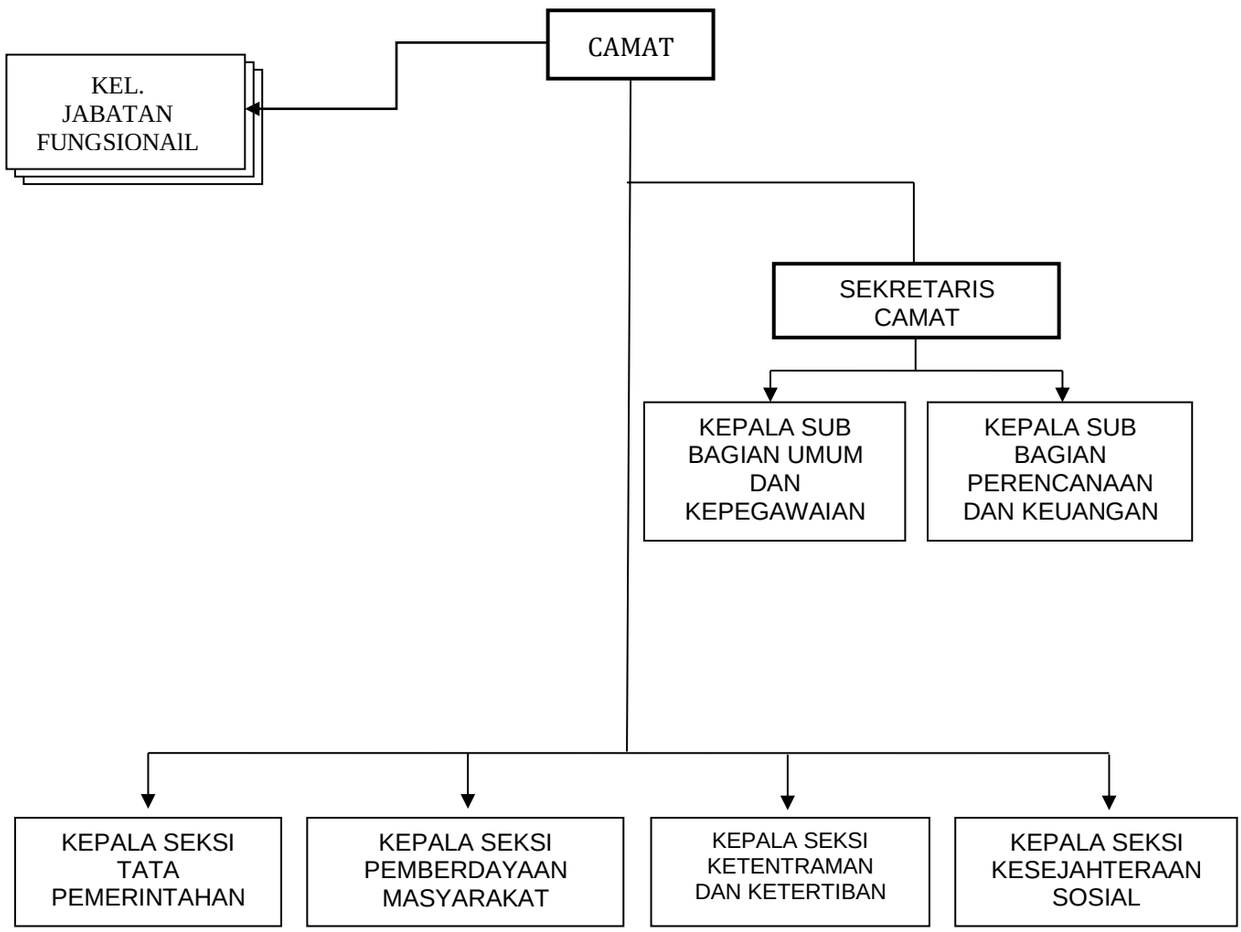
Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen,susunan Organisasi Kecamatan Ayah adalah sebagai berikut:

a) Camat
b) Sekretariat Kecamatan:
   1.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
   2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c) Seksi Tata Pemerintahan
d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban
e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
f) Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
g) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Organisasi Kecamatan Klirong, sebagai berikut :

Bagan organisasi Kecamatan Klirong dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

Gambar 1.
Bagan Organisasi Kecamatan Klirong.



Sedangkan Kedudukan Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpim oleh Camat, Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

Aparatur Pemerintah Kecamatan Klirong pada tahun 2023 ini berjumlah 13 orang yang terdiri dari Pejabat struktural sebanyak 8 orang dan staf sebanyak 5 orang. Adapun susunan kepegawaian di Kantor Kecamatan Klirong sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 1.2

Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Klirong

No	Jabatan	Jumlah
1.	Camat	1 Orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 Orang
3.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1 Orang
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 Orang
5.	Kasi Tata Pemerintahan	1 Orang
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1 Orang
8.	Kasi Kesejahteraan Sosial	1 Orang
9.	Staf	5 Orang
	Jumlah	13 Orang

Keterangan :

Adapun Jumlah Pegawai menurut golongan pangkat sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.3

Susunan Kepegawaian berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	Pembina Tingkat 1	IV/b	1 Orang
2.	Pembina	IV/a	1 Orang
3.	Penata Tingkat 1	III/d	5 Orang
4.	Penata Muda Tingkat 1	III/b	2 Orang
5.	Penata Muda	III/a	2 Orang
6.	Penata	III/c	1 Orang
7.	Pengatur	II/c	1 Orang
	Jumlah		13 Orang

1.2. Fungsi Strategis

Untuk selalu tetap eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan berubah dengan cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus selalu terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan ini harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan ber kelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Klirong untuk kondisi lima tahun kedepan :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan SKPD yang semakin baik;
2. Peningkatan kualitas pelayanan, standar pelayanan dan cakupan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana;
3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan kesejahteraan aparatur pemerintah; serta,
4. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (Stakeholders).

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang direncanakan secara analisis, realitis, rasional dan konprehensip. Strategi Pemerintahan Kecamatan Klirong untuk mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan maka strategi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Klirong adalah ”Terwujudnya Kecamatan Sebagai Institusi Pelayanan Masyarakat Yang Profesional ” dan ”Koordinator Pembina Kewilayahan yang profesional dengan upaya pendekatan yang berprinsip dengan pemberdayaan masyarakat” dengan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Pemberian Pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan;
2. Meningkatkan kualitas koordinasi antar instansi,peningkatan pembinaan/fasilitasi/monitoring dan evaluasi kepada pemerintah desa;
3. Penguatan Kapasitas kelembagaan kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat desa;
4. Pengembangan potensi sumber daya alam, perikanan, kelautan dan wisata.

Dari uraian di atas tentang visi, misi, arah kebijakan dan strategi kemudian dirumuskan *issue strategis* yang diformulasikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Klirong terhadap pelayanan publik yang mudah, cepat dan dapat terjangkau serta memiliki kualitas pelayanan yang prima;
2. Meningkatnya kebutuhan instansi Pemerintah akan aparatur yang memiliki kualifikasi memadai untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
3. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan;
4. Meningkatnya potensi masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam antara lain sumber daya perikanan dan kelautan termasuk potensi pengembangan wisata di Kecamatan Klirong.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah

langkah-langkah berisikan program-program indikatif ,untuk mewujudkan tujuan visi dan misi di atas,perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan Pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja;
2. Penguatan reformasi kebijakan Pendidikan, pemuda dan olahraga serta seni dan budaya, dengan setting goal :cerdas, berakhlak mulia dan berkepribadian Indonesia"
3. Reformasi kebijakan di bidang Kesehatan;
4. Penguatan Upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah;
5. Penguatan Langkah reformasi pola piker, pola sikap dan pola tindak;
6. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan public;
7. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani Masyarakat;
8. Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian;
9. Reformasi dibidang pengembangan kawasan baru;
10. Penguatan pembaharuan kebijakan di bidang pertanian;
11. Penguatan perlindungan dan peran Perempuan;
12. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan Masyarakat; dan
13. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Adapun sasaran guna mendukung tujuan Kecamatan di atas ,antara lain :

1) Adanya dokumen perencanaan program kegiatan yang matang yang dihasilkan melalui prosedur
2) Adanya standar operasional public untuk mewujudkan pelayanan prima kepada Masyarakat
3) Terciptanya suatu koordinasi dengan SKPD dan instansi vertical lainnya dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan,Pembangunan dan pelayanan terhadap Masyarakat
4) Terlaksananya pembinaan ,pengawasan ,bimbingan,supervise,fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
5) Terlaksananya evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan,Pembangunan dan pelayanan terhadap Masyarakat

Indikator yang disusun untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun
2. Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun

3. Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan
4. Junlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD
5. Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
7. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor
10. Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Jumlah bulan penyediaan arsip dinamis pada SKPD
12. Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
13. Jumlah bulan penyediaan surat menyurat
14. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan Listrik
15. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor
16. Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional
17. Jumlah unit penyediaan pemeliharaan mebel
18. Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
19. Jumlah unit pemeliharaan /rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
20. Jumlah jenis nonperizinan yang dilaksanakan
21. Jumlah kegiatan fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI
22. Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa
23. Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan Pilkades
24. Jumlah desa yang direkomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
25. Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan desa
26. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
27. Jumlah kegiatan fasilitasi musrenbangdes/kec
28. Jumlah dokumen penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat desa
29. Jumlah desa yang difasilitasi pendampingan desa di wilayahnya

Strategi dan Kebijakan Kecamatan

Untuk selalu tetap eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan berubah dengan cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus selalu terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan ini harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan ber kelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Klirong untuk kondisi lima tahun kedepan :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan SKPD yang semakin baik;

2. Peningkatan kualitas pelayanan, standar pelayanan dan cakupan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana;

3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan kesejahteraan aparatur pemerintah; serta,

4. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (Stakeholders).

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang direncanakan secara analisis, realitis, rasional dan konprehensip. Strategi Pemerintahan Kecamatan Klirong untuk mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan maka strategi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Klirong adalah ”Terwujudnya Kecamatan Sebagai Institusi Pelayanan Masyarakat Yang Profesional ” dan ”Koordinator Pembina Kewilayahan yang profesional dengan upaya pendekatan yang berprinsip dengan pemberdayaan masyarakat” dengan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Pemberian Pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan;
2. Meningkatkan kualitas koordinasi antar instansi,peningkatan pembinaan/fasilitasi/monitoring dan evaluasi kepada pemerintah desa;
3. Penguatan Kapasitas kelembagaan kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat desa
4. Pengembangan potensi sumber daya alam, perikanan, kelautan dan wisata.

Dari uraian di atas tentang visi, misi, arah kebijakan dan strategi kemudian dirumuskan *issue strategis* yang diformulasikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Klirong terhadap pelayanan publik yang mudah, cepat dan dapat terjangkau serta memiliki kualitas pelayanan yang prima;
2. Meningkatnya kebutuhan instansi Pemerintah akan aparatur yang memiliki kualifikasi memadai untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
3. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan;
5. Meningkatnya potensi masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam antara lain sumber daya perikanan dan kelautan termasuk potensi pengembangan wisata di Kecamatan Klirong.

1.3. Permasalahan utama yang dihadapi

Permasalahan didefinisikan sebagai sutu pernyataan tentang keadaan/ kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Klirong sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Klirong yang masih kurang personilnya karena banyak yang memasuki masa Purna Tugas, dan masih ada ASN yang dalam IT kurang potensial sehingga kinerja kurang maksimal.

Sarana prasarana yang ada banyak yang sudah tidak layak pakai karena rusak ringan dan rusak berat, ini sangat berpengaruh pada kelancaran kerja dan kelancaran pelayanan maka ini menjadi perhatian untuk Petugas Pengelola Barang Milik Daerah (BMD).

Permasalahan di Kecamatan Klirong yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 , belum optimalnya pelayanan kecamatan dikarenakan :

1. Kurangnya kemampuan SDM Kecamatan, anatara lain Pendidikan SDM Kecamatan perlu ditingkatkan, perbaikan pola kerja, sinkronisasi anatar pejabat di kecamatan belum maksimal
2. Kurangnya peran serta Masyarakat, antara lain kesadaran administrasi rendah, masih rendahnya perekonomian, rendahnya pendidikan
3. Masih minimnya sarana pendukung, antara lain sarana IT kurang mendukung, sarana pelayanan masih kurang, tata ruang pelayanan kurang mendukung

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Klirong Tahun 2021-2026 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalisasikan melaui Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dimana dalam berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan dalam mewujudkan Visi, Misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.

Pemerintah Kecamatan Klirong sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis sebagai pedoman perencanaan. Rencana Strategis pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi Aparat Pemerintah Kecamatan Klirong tetapi dapat juga sebagai panduan untuk semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Klirong. Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Pemerintah Kecamatan Klirong. Dengan telah Rencana Strategis ditetapkan, Kecamatan Klirong sudah mempunyai pedoman dan arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

a. VISI

Kecamatan Klirong memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yag dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

b. MISI

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatau keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban

masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.

- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilkinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai eksport, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjungjung tinggi nilai-nilai religious yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlau dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;

3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
2. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
3. Penguatan langkah reformasi pola piker, pola sikap, dan pola tindak;
4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
6. Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan anak;
7. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;
8. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. Go-lak yaitu jemput kerumah layanan administrasi kependudukan program pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke rumah. “ora antri, ora suwe, cepet dadi”
2. Satu data untuk semua
   Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. Keris Patih = Kebumen reformasi sistem pemerintahan terintegra dan bersih, stop korupsi, grafikasi dan pungli dengan penggunaansitem e-gov dalam peleyanan publik dan pengelolaan pemerintahan.
4. Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)
5. Festival Anggaran, keterbukaan informasi publik
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
8. Kepenak = Layanan KTP anak, program pemberian layanan identitas resmi anak sebgai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah

9. Bu Desi = Kebumen modern and smart city, program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengaklerasikan potensi daerah menjadi smart city
10. Tempe Manist, program penggunaan sitem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
11. Kaya Maselin, program peningkatan pelayanan masyarakat secara on line.
12. Permisi, program penyerderhanaan administrasi pelayanan
13. Tariyan, program tiada hari tanpa pelayanan
14. Yan Jempot, program pelayanan jemput bola
15. Pentas, program peningkatan kapasitas ASN
16. Wament, program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Ayah adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntuk Kecamatan Ayah lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparasi informasi melalui media massa dituntut peran Kecamatan Ayah harus lebih responsife terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

Faktor Penghambat:

1.Masih adanya seksi yang kekurangan staf;
2.Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3.Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten,dan
4.Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam Suatu system yang terpadu,efektifdan efisien.

Daftar program dan kegiatan beserta indicator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan misi tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kec. Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan danp Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawan	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	**Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan**	**7.01.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**1.525.412.000**	**100%**	**1.600.158.000**	**100%**	**1.600.158.000**	**100%**	**1.600.158.000**	**100%**	**1.600.158.000**	**100%**	**7.926.044.000**		
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9 Dokumen**	**11 Dokumen**	**11 Dokumen**	**10.500.000**	**11 Dokumen**	**10.700.000**	**11 Dokumen**	**10.700.000**	**11 Dokumen**	**11.164.000**	**11 Dokumen**	**10.700.000**	**55 Dokumen**	**53.764.000**		
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah yang disusun(Renstra, Renja ,RKA/DPA, RKAP/DPPA)	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	7.500.000	6 Dokumen	7.600.000	6 Dokumen	7.600.000	6 Dokumen	7.600.000	6 Dokumen	7.600.000	30 Dokumen	37.900.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, LKSKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000	5 Dokumen	3.100.000	5 Dokumen	3.100.000	5 Dokumen	3.564.000	5 Dokumen	3.100.000	25 Dokumen	15.864.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen

		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**1.364.550.000**	**12 Bulan**	**1.384.844.000**	**12 Bulan**	**1.384.844.000**	**12 Bulan**	**1.384.844.000**	**12 Bulan**	**1.384.844.000**	**60 Bulan**	**6.903.926.000**		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	13 Orang	13 Orang	13 Orang	1.340.550.000	13 Orang	1.352.935.000	13 Orang	1.360.344.000	13 Orang	1.360.344.000	13 Orang	1.360.344.000	65 orang	6.781.926.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang melaksanakan rakor dan konsultasi	0	15 Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15 orang	-	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang pengelola administrasi keuangan, Jumlah jenis dokumen pengelola administrasi keuangan Perangkat Daerah	7 Orang, 3 Jenis	7 Orang, 3 Jenis	7 Orang, 3 Jenis	24.000.000	7 Orang, 3 Jenis	31.899.000	7 Orang, 3 Jenis	24.500.000	7 Orang, 3 Jenis	24.500.000	7 Orang, 3 Jenis	24.500.000	35 Orang, 3 Jenis	122.000.000		
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**63.500.000**	12 Bulan	**66.200.000**	12 Bulan	**69.414.000**	12 Bulan	**66.200.000**	12 Bulan	**66.200.000**	60 Bulan	**323.514.000**		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	6.000.000	4 Jenis	6.200.000	4 Jenis	6.400.000	4 Jenis	6.200.000	4 Jenis	6.200.000	4 Jenis	31.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.500.000	12 Bulan	20.514.000	12 Bulan	20.500.000	12 Bulan	20.500.000	60 Bulan	102.014.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	14.000.000	12 Bulan	14.400.000	12 Bulan	14.800.000	12 Bulan	14.400.000	12 Bulan	14.400.000	60 Bulan	72.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid)	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	2.500.000	1 Jenis	2.600.000	1 Jenis	2.700.000	1 Jenis	2.600.000	1 Jenis	2.600.000	1 Jenis	13.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	16.000.000	12 Bulan	16.500.000	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	16.500.000	12 Bulan	16.500.000	60 Bulan	83.500.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	4 orang/kali	4 orang/kali	6 orang/kali	3.000.000	8 orang/kali	4.000.000	10 orang/kali	5.000.000	12 orang/kali	4.000.000	14 orang/kali	4.000.000	50 Orang/kali	20.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen

		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah bulan pengelolaan arsip	12	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	60 Bulan	2.000.000	Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11 Unit**	**24Unit**	**4 Unit**	**49.000.000**	**19 Unit**	**28.000.000**	**8 Unit**	**41.200.000**	**18 Unit**	**44.950.000**	**10 Unit**	**42.500.000**	**66 Unit**	**156.650.000**		
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit		2 Unit	-	Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebeleur	3 Unit	-	1 Unit	-	10 Unit	-	-	-	4 Unit	10.950.000	4 Unit		19 Unit	10.950.000	Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor	5 Unit	4 Unit	3 Unit	-	4 Unit	20.000.000	3 Unit	21.200.000	4 Unit	22.000.000	2 Unit	22.500.000	16 Unit	85.700.000	Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	18 Unit	-		5 Unit	8.000.000	6 Unit	20.000.000	10 Unit	12.000.000	8 Unit	20.000.000	29 Unit	60.000.000	Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**41.000.000**	**12 Bulan**	**42.500.000**	**12 Bulan**	**42.500.000**	**12 Bulan**	**42.500.000**	**12 Bulan**	**42.414.000**	**12 Bulan**	**210.914.000**		
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	1.500.000	60 Bulan	7.000.000	Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	20.500.000	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	20.914.000	60 Bulan	104.414.000	Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor, jumlah petugas kebersihan kantor	12 Bulan, 1 Orang	12 Bulan, 1 Orang	12 Bulan, 1 Orang	19.500.000	12 Bulan, 1 Orang	20.000.000	12 Bulan, 1 Orang	20.000.000	12 Bulan, 1 Orang	20.000.000	12 Bulan, 1 Orang	20.000.000	60 Bulan, 1 Orang	99.500.000	Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**26 Unit**	**32 Unit**	**37 Unit**	**61.725.000**	**36 Unit**	**67.914.000**	**37 Unit**	**51.500.000**	**33 Unit**	**50.500.000**	**38 Unit**	**53.500.000**	**181 Unit**	**269.276.000**		
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,	8 Unit	10 Unit	10 Unit	28.000.000	10 Unit	29.000.000	10 Unit	30.000.000	10 Unit	29.000.000	12 Unit	29.000.000	52 Unit	145.000.000	Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebume

			, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional															n
		7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5 Unit	5 Unit	5 Unit	2.000.000	4 Unit	2.500.000	4 Unit	2.500.000	4 Unit	2.500.000	4 Unit	2.500.000	21 Unit	12.000.000	Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	11 Unit	15 Unit	20 Unit	14.725.000	20 Unit	15.000.000	24Unit	15.000.000	18 Unit	15.000.000	20 Unit	15.000.000	100 Unit	67.362.000	Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan banguinan lainnya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	17.000.000	2 Unit	4.000.000	1 Unit	4.000.000	1 Unit	4.000.000	2 Unit	7.000.000	8 Unit	27.500.000	Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen
		7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**100%**	**100%**	**100%**	**71.753.000**	**100%**	**71.753.000**	**100%**	**71.753.000**	**100%**	**71.753.000**	**100%**	**71.753.000**	**100%**	**358.765.000**		
		7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**71.753.000**	**5 Jenis**	**71.753.000**	**5 Jenis**	**71.753.000**	**5 Jenis**	**71.753.000**	**5 Jenis**	**71.753.000**	**5 Jenis**	**358.765.000**		
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang,), Jumlah THL PATEN yang terbayar	5 Jenis, 4 Orang	5 Jenis, 4 Orang	5 Jenis, 4 Orang	71.753.000	5 Jenis, 4 Orang	71.753.000	5 Jenis, 4 Orang	71.753.000	5 Jenis, 4 Orang	71.753.000	5 Jenis, 4 Orang	71.753.000	5 Jenis, 4 Orang	358.765.000	Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen
		7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**14.000.000**	**100%**	**14.000.000**	**100%**	**14.000.000**	**100%**	**14.000.000**	**100%**	**14.000.000**	**100%**	**70.000.000**		
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**14.000.000**	2 Kegiatan	**14.000.000**	2 Kegiatan	**14.000.000**	2 Kegiatan	**14.000.000**	2 Kegiatan	**14.000.000**	**10 Kegiatan**	**70.000.000**		
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	Jumlah rangkaian kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kebumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	14.000.000	2 Kegiatan	14.000.000	2 Kegiatan	14.000.000	2 Kegiatan	14.000.000	2 Kegiatan	14.000.000	10 Kegiatan	70.000.000	Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen

			Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara																
		7.01.06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**123.500.000**	**100%**	**141.900.000**	**100%**	**132.280.000**	**100%**	**186.528.000**	**100%**	**128.051.000**	**100%**	**813.593.000**		
		7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**24 Desa**	**24 Desa**	**24 Desa**	**123.500.000**	**24 Desa**	**141.900.000**	**24 Desa**	**132.280.000**	**24 Desa**	**186.528.000**	**24 Desa**	**128.051.000**	**120 Desa**	**813.593.000**		
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	24 Desa	24 Desa	24 Desa	42.000.000	24 Desa	44.000.000	24 Desa	43.880.000	24 Desa	48.000.000	24 Desa	44.651.000	120 Desa	222.531.000	Kecamatan Kliro ng	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Pemilihan Kepala Desa	0	0	0		2 Desa	8.000.000	0		24Desa	30.000.000	0		24 Desa	139.334.000	Kecamatan Kliro ng	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.05	Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa	2 Desa	4 Desa			6 Desa	3.500.000	6 Desa	3.000.000	6 Desa	4.000.000	6 Desa		24 Desa	10.500.000	Kecamatan Kliro ng	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, Jumlah Rakor sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 Dokumen, 2 Kali	2 Dokumen, 2 Kali	2 Dokumen, 2 Kali	15.500.000	2 Dokumen, 2 Kali	15.700.000	2 Dokumen, 2 Kali	15.000.000	2 Dokumen, 2 Kali	16.200.000	2 Dokumen, 2 Kali	15.000.000	10 Dokumen, 10 Kali	77.400.000	Kecamatan Kliro ng	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang di fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	24 Desa, 0 Kali	24 Desa, 1 Kali	24 Desa, 1 Kali	6.000.000	24 Desa, 1 Kali	6.200.000	24 Desa, 1 Kali	6.400.000	24 Desa, 1 Kali	12.000.000	24 Desa, 1 Kali	6.400.000	120 Desa, 5 Kali	37.000.000	Kecamatan Kliro ng	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes/kel	24 Desa	24 Desa	24 Desa	28.000.000	24 Desa	30.000.000	24 Desa	30.000.000	24 Desa	35.000.000	24 Desa	30.000.000	120 Desa	153.000.000	Kecamatan Kliro ng	Kabupaten Kebumen

				Jumlah kegiatan musrenbangcam	2 kali	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		10 Kali		Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Pembinaan PKK	24 Desa	4 Kegiatan	4 Kegiatan	22.000.000	4 Kegiatan	24.000.000	4 Kegiatan	24.000.000	4 Kegiatan	29.328.000	4 Kegiatan	22.000.000	20 Kegiatan	121.328.000	Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen
				Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	24 Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen
				Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat	0 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		15 Kegiatan		Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen
				Jumlah kegiatan pembinaan BUMDes	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen
				Jumlah kegiatan fasilitasi UKS	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	u	5 Kegiatan		Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang di fasilitasi TKP2KDes	24 Desa	24 Desa	24 Desa	10.000.000	24 Desa	10.500.000	24 Desa	10.000.000	24 Desa	12.000.000	24 Desa	10.000.000	120 desa	52.500.000	Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen
				Jumlah fasilitasi kegiatan pendampiangan Desa (Bansos Sembako)	24 Desa	24 Desa	24 Desa		24 Desa		24 Desa		24 Desa		24 Desa		120 Desa		Kecamatan Kliring	Kabupaten Kebumen
		JUMLAH	4 PROGRAM, 9 KEGIATAN, 33 SUB KEGIATAN					1.734.665.000		1.929.145.000		3.060.734.000		3.060.734.000		3.060.734.000				

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

NO.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Public oleh Kecamatan Klirong	Indek	76,65	84,32	84,65	86,00	87,00	88,50	89,00	89,00

2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

a. Meningkatnya Perencanaan, Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian
b. Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang memuaskan
c. Meningkatnya kondusifitas Kecamatan Klirong
d. Meningkatnya desa membangun kategori maju dan mandiri

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Klirong Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Table 2.1.2
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Klirong Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Individu	Target
1	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	86,00

2.2. Perjanjian Kinerja

Adapun perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah dilakukan perubahan 2 kali Kantor Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen termuat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II TAHUN 2023
OPD KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks	86,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
	Sasaran:								
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	86,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dokumen	40	40	12	12	12	4
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan	Desa	24	24	24	24	24	24
	Meningkatnya Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Jumlah Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Desa/Jumlah Desa	9/24	9/24	9/24	9/24	9/24	9/24

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.657.813.000,-	1.933.741.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	70.000.000,-	77.566.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8.000.000,-	8.000.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	167.567.000,-	167.567.000,-	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2023 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Masukan *(inputs)* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;

b. Keluaran *(outputs)* adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;

c. Hasil *(outcomes)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;

d. Manfaat *(benefits)* adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;

e. Dampak *(impacts)* adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input, output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2023 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.qd 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	89,23	103,76%
	Sasaran				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Klirong	86	86,96	101,12%

3.2. Realisasi Anggaran

Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan.
Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen tahun 2023 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,93	86	86,96	101,12%	89	102,35%

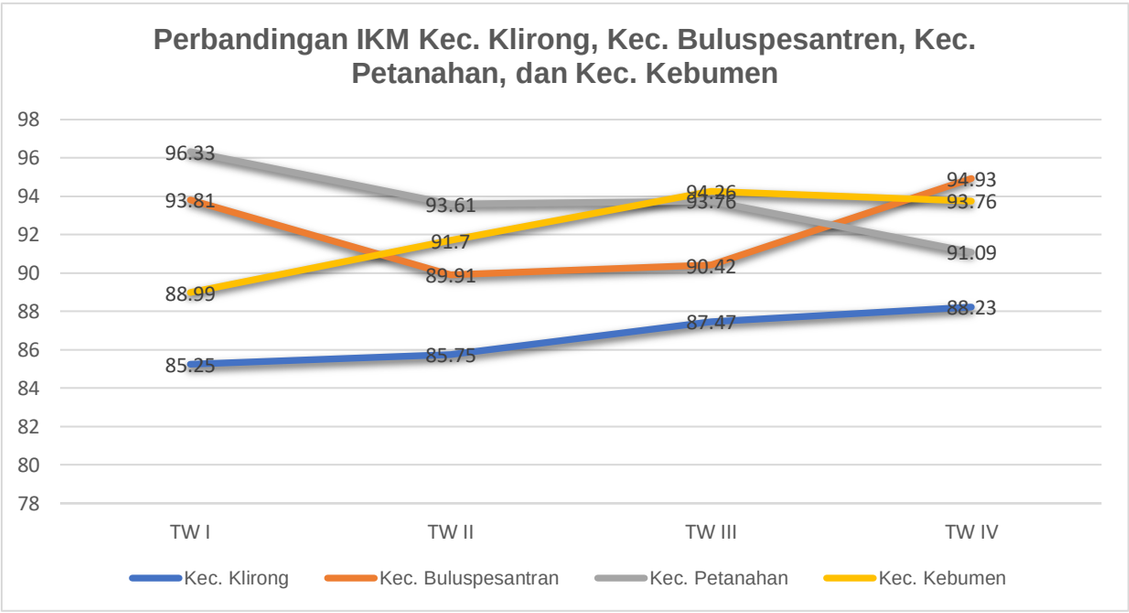
Sumber : Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, 2023.

Realisasi IKM tahun 2023 (86,96) sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022

(84,93) dikarenakan pada tahun 2023 jumlah sampel sudah diambil dari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar 101,12% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 102,35%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen dengan IKM Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Kebumen dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



IKM Triwulanan Kecamatan Klirong jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kec. Buluspesantren, Kec. Petanahan, dan Kec. Kebumen Tahun 2023 mengalami penurunan dari IKM Kec. Buluspesantren, IKM Kec. Petanahan dan IKM Kec. Kebumen demikian realisasi IKM Kecamatan Klirong masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik **Baik.**

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Klirong, IKM Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Kebumen

Tahun 2023

No	Unsur	Nilai Kec. Klirong		Nilai Kec. Buluspesantren		Nilai Kec. Petanahan		Nilai Kec. Kebumen	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	88,18	Baik	91,06	Sangat Baik	93,73	Sangat Baik	92,14	Sangat Baik
2	Prosedur	90,08	Sangat Baik	90,24	Sangat Baik	93,64	Sangat Baik	92,58	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	82,55	Baik	88,94	Sangat Baik	91,49	Sangat Baik	90,06	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	99,83	Sangat Baik	99,85	Sangat Baik	99,43	Sangat Baik	99,41	Sangat Baik
5	Produk Layanan	84,26	Baik	93,10	Sangat Baik	94,38	Sangat Baik	92,18	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	82,60	Baik	93,89	Sangat Baik	93,18	Sangat Baik	93,17	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	85,20	Baik	93,81	Sangat Baik	93,92	Sangat Baik	90,97	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	84,02	Baik	91,40	Sangat Baik	93,16	Sangat Baik	91,81	Sangat Baik

9	Penanganan Pengaduan	91,22	Sangat Baik	96,50	Sangat Baik	98,90	Sangat Baik	96,67	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kec. Klirong rata-rata kategori **Baik**, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Kompetensi Pelaksana dan Sarana dan Prasarana.

Unsur Prioritas Perbaikan atau rencana tindak lanjut terhadap tiga unsur nilai terendah sebagai berikut :

1. Unsur Waktu Pelayanan : Publikasi waktu dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2. Unsur Kompetensi Pelaksana : Dilaksanakan peningkatan kapasitas bagi Pelaksana pelayanan publik
3. Unsur Sarana dan Prasarana : Pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik melalui proses perencanaan penganggaran

Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2023. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Tujuan/Sasaran	**Indikator Kinerja**	**% Capaian**	**Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**% Capaian**	**Menunjang/ Tidak Menunjang**
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	103,76%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klirong	101,12%	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	Menunjang
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	84,16%	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95,75%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98,82%	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	94,50%	Menunjang

			Daerah			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,85%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Publik	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	98,70%	Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	98,70%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	99,44%	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	99,44%	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Cakupan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	95,27%	Menunjang
			Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	95,27%	Menunjang
				Rata-rata	95,78%	Menunjang

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (Empat) Program dan 8 (Delapan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 95,78% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Efisiensi Anggaran Kecamatan Klirong
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	**Tingkat Efisiensi**
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	86	89,23	103,76%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	86	86,96	101,12%	2.186.874.000	2.094.513.046	95,78%	4,22%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen mempunyai nilai baik berada pada angka 4,22% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 86,96 atau capaian kinerja sebesar 101,12% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 95,78% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2023 (86,96) sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (84,93) dikarenakan pada tahun 2023 jumlah sampel sudah diambil dari masyarakat Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

4.2. Permasalahan/ Kendala

Permasalahan di Kecamatan Klirong yang masih dihadapi, belum optimalnya pelayanan kecamatan dikarenakan :

1. Kurangnya kemampuan SDM Kecamatan, anatara lain Pendidikan SDM Kecamatan perlu ditingkatkan, perbaikan pola kerja, sinkronisasi anatar pejabat di kecamatan belum maksimal
2. Kurangnya peran serta Masyarakat, antara lain kesadaran administrasi rendah, masih rendahnya perekonomian, rendahnya Pendidikan
3. Masih minimnya sarana pendukung, antara lain sarana IT kurang mendukung, sarana pelayanan masih kurang, tata ruang pelayanan kurang mendukung

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

IKM Kecamatan Klirong rata-rata kategori **Baik**, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Kompetensi Pelaksana dan Sarana dan Prasarana.

Unsur Prioritas Perbaikan atau rencana tindak lanjut terhadap tiga unsur nilai terendah sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan : Publikasi waktu dalam menyelenggarakan pelayanan publik
2. Unsur Kompetensi Pelaksana : Dilaksanakan peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan publik
3. Unsur Sarana dan Prasarana : Pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik melalui proses perencanaan penganggaran

Dalam pengelolaan anggaran untuk membuat daftar pelaksaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah

ditentukan.

LKjIP Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, 30 Januari 2024

CAMATKLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN

EKO PURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197901161998101001